

MEMAHAMI JURNALISME DIGITAL DAN RUNTUHNYA *CIVIL SOCIETY*

Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika rezim orde lama bertahan nyaris seumur hidup kebebasan ibarat angan-angan kosong. Saat itu, ditengah mulai munculnya pergolakan politis, para pemilik aspirasi yang terdiri dari insan pers dan publik dari berbagai kalangan telah kehilangan kekuatan. Pemerintah dengan otoritasnya mengebiri hak bersuara atau sekedar menyampaikan gagasan-gagasan. Dibawah rezim Soekarno dengan segala kesimpang-siuran komando, oknum-oknum yang mengaku pasukan keamanan negara tidak segan-segan memberikan ancaman teror hingga eksekusi berdarah.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan jalan cerita yang lain. Sebut saja tokoh seperti Soe Hok Gie, dengan heroik ia berhasil menghidupkan beberapa media cetak seperti Indonesia Raya yang kritis dan media Pedoman. Gagasan-gagasannya kala itu seringkali menghiasi muka media cetak tersebut. Alhasil, Gie menerima berbagai teror dan kecaman dari pemerintahan. Akan tetapi, kegigihan Gie berhasil memantik semangat kebersatuan ribuan mahasiswa hingga menggulung rezim orde baru pada tahun 1966.

Tergulingnya rezim orde lama menuju orde baru yang dipegang Soeharto bukanlah suatu titik balik bagi dunia pers. Oleh Soeharto, pers justru ditekan dan dikendalikan layaknya mesin-mesin politik. Pemerintah memonopoli fungsi pers bukan lagi sebagai *social control* melainkan sebagai kekuatan memanipulasi citra pemerintahan dan berbagai penipuan lainnya. Pers mengalami kemandulan yang kronis.

Ketika rezim Soeharto telah menemui titik kritis secara politis, mahasiswa kembali menggulung pemerintahan pada tahun 1998. Gelombang reformasi telah membawa pers nasional tampil lebih leluasa dan elegan. Masuknya milenium baru peradaban manusia yang ditandai dengan kemunculan berbagai kemajuan di bidang komunikasi semakin mendukung kebugaran pers nasional. Sebagai contoh, pers nasional tidak lagi berkutat pada sektor media cetak, tetapi juga dengan progressif berkembang melalui televisi, radio, dan internet yang identik dengan sebutan media massa.

Euforia Media Massa Pasca Reformasi

Lepas dari masa-masa kritis, pers nasional berkembang dengan agresif. Fungsi-fungsi pers sebagai sumber informasi terpercaya, pengintegrasikan pemerintahan dan rakyat, lahan bisnis, dan hiburan berjalan dengan baik. Pers menjalankan fungsinya sebagai social control dengan seutuhnya. Jika pada era orde baru pers dibredel karena mengungkap skandal pemerintahan, era reformasi menjadi titik balik dimana pers dengan dukungan rakyat mampu memberedel penyimpangan-penyimpangan dalam pemerintahan. Secara politis, pers pada era reformasi tak ubahnya seperti anjing pelacak yang mampu mengendus kejahatan-kejahatan yang disembunyikan, dilain fungsi informatif, ekonomis, dan hiburannya.

Trend Jurnalisme Media Massa Digital

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah merombak berbagai tatanan kehidupan manusia termasuk dalam jurnalisme. Setidaknya semenjak tahun 2010, publik dunia dapat menganggap aktivitas online merupakan hal yang lumrah dan biasa. Sebut saja kemunculan beberapa media sosial seperti *facebook* dan *twitter* yang menjamur penggunaannya. Secara tidak langsung, masuknya media harian dalam format web turut dipengaruhi masifnya pemanfaatan media sosial. Dapat diasumsikan, setidaknya para pelaku bisnis pers melihat adanya suatu keterpaksaan mengikuti persaingan pasar dan efisiensi mempertahankan eksistensi dengan beberapa keuntungan seperti *expressiveness*, *permanent of record*, *swiftness*, dan *diffusion*.

Dilain sisi, bergesernya peradaban manusia konvensional yang serba barang fisik menuju modernitas serba virtual dalam mengakses informasi telah mengaburkan beberapa hal dalam jurnalisme yang berdampak pada:

1. Setiap orang dapat menjadi jurnalis (*citizen journalism*)
2. Transfer informasi terjadi begitu cepat
3. Munculnya sudut pandang yang beragam dan kabur

4. Kompleksitas informasi membuat kaidah jurnalistik terabaikan
5. Rentan provokasi dan sarkatisme

Turunnya Kebermaknaan Kebebasan dan Runtuhnya *Civil Society*

Ketika rezim pra reformasi mengebiri insan pers dan masyarakat, publik menganggap seolah kebebasan mengemukakan pendapat menjadi sesuatu yang istimewa dan berharga. Akan tetapi, ibarat kata lain zaman lain mode, reformasi dan mobilitas akses informasi secara interaktif telah menggiring sebagian publik menjadi golongan kufur. Dewasa ini, siapapun bisa bertingkah otoriter layaknya Soeharto atau Hitler sekalipun. Setiap orang tanpa memandang status apapun bisa menghina-dinakan pejabat pemerintahan, tidak terkecuali presiden. Ironisnya, jurnalisme yang mulai biasa dikemas secara *virtual online* yang beberapa pengamat menyebut mampu menaikkan keterbukaan *civil society* justru penulis menyebutnya sebagai pisau bermata dua. Dilain sisi meningkatkan partisipasi politis-aspiratif publik, namun dilain sisi justru memicu berbagai konflik horizontal. Sebagai contoh, tentu kita masih ingat panasnya persaingan pilpres 2014 silam. Berbagai media massa justru menunjukkan pengabaian etika jurnalistik dengan mempertontonkan keberpihakan dan lemahnya fungsi *cover both side*. Alhasil, terjadilah *tension* antara kubu satu dengan lainnya secara berlebihan.

Selanjutnya, keberadaan *netizen* yang sebagian besar justru bukan dari kaum intelek cenderung berlaku reaktif terhadap berbagai isu yang beredar. Terlebih informasi-informasi yang disampaikan dalam media online cenderung bersifat ringkas dan instan. Kita dapat membandingkan sendiri detail konten antara media cetak dan media online. Hal ini dapat dimaklumi sebagai strategi bisnis. Tentu tidak mungkin sebuah perusahaan pers menyuplai berita dengan detail sama persis diantara keduanya, sedangkan versi online adalah kanal yang dapat diakses secara gratis. Berita-berita yang ringkas dan terkadang tidak lugas dengan *provocative headline* seringkali menimbulkan sikap gegabah *netizen*. Komentar berupa hujatan, cacian, makian, dan segala bala frontal-sarkatisme seringkali justru mendominasi perbincangan didalamnya. Oleh sebab

itu, penulis berasumsi disinilah awal mula kehancuran sebuah *civil society* dalam konteks jurnalisme digital ini.

Lazimnya, *civil society* atau ruang publik merupakan wahana masyarakat menyampaikan aspirasi dengan seaspiratif mungkin, namun dengan berbagai kelebihan dan kekurangan media online justru sesuatu yang menjadi tujuan keberadaan *civil society* itu sendiri tidak terpenuhi. Publik lebih sibuk berdebat, menghujat, dan beradu tensi daripada menciptakan suatu ide-ide *brilliant* untuk menyelesaikan permasalahan berdasar topic terkait.

Lebih lanjut, sebagai sarana pembelajaran politik, jelas sekali bahwa segala kenyataan yang mengiringi keberadaan jurnalisme online cenderung mengarahkan publik pada mosi tidak percaya dengan pemerintahan dan pesimisme-pesimisme lainnya. Seolah-olah ketika terekspos skandal seorang pejabat maka rusaklah seluruh pejabat lainnya, atau terekspos keburukan perilaku seorang warga Indonesia, maka dengan santai *netizen* berujar “Indonesia, Indonesia...kapan sih kamu berubah, maklum, Indonesia gitu loh...wkwkwk”, tanpa menyadari bahwa dirinya sendiri adalah orang Indonesia yang mungkin tidak pernah berubah dari kebiasaan buruk. Dalam kasus ini, maka penulis menyebut tujuan *civil society* juga gagal tercapai.

Solusi

Menimbang segala kelebihan dibalik berbagai kekurangan yang ditimbulkan dari jurnalisme digital, jurnalisme versi ini sejatinya masih memiliki harapan untuk membangun *civil society* yang sehat dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya dengan memperhatikan:

1. Konsistensi terhadap penerapan kode etik jurnalistik
2. Keseimbangan penekanan pemberitaan negatif dan positif
3. Kemanfaatan konten bagi pembaca